



ANALISIS KEBIJAKAN **EKONOMI MAKRO** DAN POKOK-POKOK **KEBIJAKAN FISKAL** TAHUN ANGGARAN 2024

Rasidin Karo Karo Sitepu | Rama Mahesa
Rindang Mustikawati | Arief Maulana



ANALISIS KEBIJAKAN **EKONOMI MAKRO** DAN POKOK-POKOK **KEBIJAKAN FISKAL** **TAHUN ANGGARAN 2024**

Rasidin Karo Karo Sitepu | Rama Mahesa
Rindang Mustikawati | Arief Maulana

ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024

Tim Penulis:

Rasidin Karo Karo Sitepu, Rama Mahesa, Rindang Mustikawati, Arief Maulana

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-500-262-0

Cetakan Pertama:

Februari, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kami sehingga dapat diberi kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan buku dengan judul “**Analisis Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2024**” ini tepat waktu yang disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN 2024.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan keahlian kepada DPD RI khususnya Komite IV dalam menjalankan tugas dan wewenang DPD RI sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 249 ayat 1 huruf g yang berbunyi menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

Buku yang disusun oleh para fungsional Analisis Legislatif di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI memuat hasil analisis terhadap proyeksi makro ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat untuk RAPBN Tahun Anggaran 2024. Buku ini juga memuat perkembangan ekonomi global dan domestik selama beberapa tahun terakhir, serta analisis proyeksi penerimaan dan belanja negara tahun 2024. Buku ini ditutup dengan simpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran kepada Komite IV DPD RI dalam memberikan pertimbangan RAPBN untuk kemudian diharapkan menjadi bahan masukan dalam menyusun pertimbangan DPD RI atas RUU APBN Tahun 2024.

Hasil kajian akademis yang implementatif dan *up to date* dengan isu-isu strategis nasional dan kedaerahan sangat dibutuhkan oleh Kasetjenan DPD RI dalam memberikan dukungan keahlian yang profesional, akuntabel, dan modern kepada DPD RI. Untuk itu, kehadiran buku ini merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan tersebut.

Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan sumbangsih khasanah keilmuan dan dukungan materi bagi alat kelengkapan di DPD RI, unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dan referensi bagi pembaca umum. Mari terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan keilmuan khususnya dalam mendukung tugas dan fungsi DPD RI guna mewujudkan Indonesia adil dan makmur.

Jakarta, Mei 2023
Sekretariat Jenderal DPD RI,
Ttd.
Dr. Rahman Hadi, M.Si.
NIP. 196909141990031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kegiatan	2
C. Ruang Lingkup Kegiatan	2
D. Metodologi	3
BAB 2 PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK	5
A. Perkembangan Ekonomi Global	5
1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia	5
2. Harga Komoditas Dunia	11
3. Suku Bunga di Beberapa Negara	14
4. Nilai Tukar Sejumlah Negara terhadap Dolar AS	17
5. Inflasi Dunia	18
B. Perekonomian Domestik	20
1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	20
2. Inflasi Domestik	24
3. Nilai Tukar Rupiah	27
4. Suku Bunga	28
5. Lifting Minyak dan Gas Indonesia	30
6. Neraca Perdagangan Indonesia	31
BAB 3 TELAAHAN TERHADAP KEM-PPKF 2024	35
A. Arahan RPJMN 2020 – 2024 dan RKP 2024	36
B. Analisis Terhadap KEM dan Postur APBN 2024	41
1. Asumsi Ekonomi Makro 2024	41
2. Target dan Proyeksi Postur APBN 2024	42
C. Proyeksi Makro Ekonomi Daerah	45
1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	46
2. Kemiskinan	49
3. Pengangguran	53
4. Inflasi Daerah	56

D. Analisis Terhadap Penerimaan Negara.....	59
1. Arah Kebijakan Makro Sektor Pendapatan Negara Dalam Dokumen KEM PPKF Tahun 2024	60
2. Analisis Atas Pokok-pokok Kebijakan Pendapatan Negara Tahun 2024.....	65
E. Analisis Terhadap Belanja Negara	69
1. Kebijakan Belanja Negara Tahun 2024	69
2. Analisis Kebijakan Belanja Negara	76
F. Analisis Terhadap Defisit dan Pembiayaan.....	80
BAB 4 PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyampaian dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 178 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan dalam Pasal 178 ayat 2 tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF selambatnya tanggal 20 Mei tahun sebelumnya, sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

KEM-PPKF Tahun 2024 sejauh ini (Tanggal 07-05-2023) belum disampaikan oleh Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan makro dan fiskal Tahun 2024. Dokumen KEM-PPKF 2024 merupakan periode terakhir dari dokumen RPJMN 2020-2024 dan di saat perekonomian global dan nasional telah mulai pulih dari krisis pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran restriksi perjalanan di seluruh dunia yang mendorong pada peningkatan aktivitas ekonomi.

Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama di kelompok energi dan pangan sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Selain dari *trend* kenaikan inflasi global dan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, beberapa risiko lain menjadi tantangan domestik karena kecenderungan pengetatan kebijakan moneter secara global. Ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas juga tantangan bagi perekonomian Nasional.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fundamental yang dinamis, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang seharusnya lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan perbaikan neraca keuangan pemerintah. Dalam RKP 2024 pemerintah telah menyusun tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah “*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”.

Tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan merupakan kunci sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Pencapaian visi tersebut tidak akan berhasil tanpa didukung oleh

BAB 2

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK

A. PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Dewasa ini, dunia sedang dibayang-bayangi oleh fenomena-fenomena besar yang berpotensi dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi global. Fenomena yang pertama adalah kenaikan suku bunga Amerika Serikat (The Fed). Kenaikan suku bunga ini mengakibatkan sulitnya perputaran uang terjadi. Hal ini juga menyebabkan biaya untuk pinjaman meningkat, pengurangan insentif investasi, pelemahan manufaktur serta pada akhirnya menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi lambat. Fenomena kedua yang dihadapi dunia adalah isu ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina. Invasi militer Rusia ini menyebabkan tensi global meningkat secara signifikan karena terdapat pro dan kontra antarnegara di dunia. Terguncangnya perekonomian dunia ini ditandai oleh naiknya harga energi seperti minyak mentah dan harga pangan secara global. Fenomena ketiga yang dihadapi dunia adalah *scarring effect* akibat pandemi Covid-19. Sejak awal tahun 2020, virus Covid-19 telah menyebar di banyak negara di dunia dan telah menimbulkan banyak dampak negatif pada perekonomian dunia.

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksi melambat pada tahun 2023, dimana sebelumnya sempat diproyeksi naik pada akhir tahun 2022. IMF merilis proyeksi bulan Januari 2023. Perekonomian global tahun 2023 secara keseluruhan diproyeksi tumbuh 2,9 persen, melambat dibandingkan proyeksi sebelumnya. Proyeksi yang melambat disebabkan peningkatan suku bunga bank sentral untuk menjaga inflasi akibat perang di Ukraina, terutama pada negara maju. Sementara untuk tahun 2024, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sedikit mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh pemulihan bertahap dari dampak krisis perang di Ukraina dan inflasi yang mereda.

Tabel 2.1. Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Negara

Kawasan	2023	2024
Negara Maju		
Amerika Serikat	1,4	1,0
Kawasan Uni Eropa	0,7	1,6
Inggris	-0,6	0,9
Jepang	1,8	0,9
Rusia	0,3	2,1
Negara Berkembang		

BAB 3

TELAAHAN TERHADAP KEM-PPKF 2024

Analisis dan telaahan terhadap KEM-PPKF menggunakan sumber dokumen KEM-PPKF Tahun 2024, hasil tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah, hasil rilis lembaga terkait dan perhitungan proyeksi program MAPAN Puskadaran. Analisis dilakukan oleh Puskada sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi unit kerja Kesekjenan DPD RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI khususnya dalam wilayah pelaksanaan wewenang pertimbangan atas RUU APBN. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 249 ayat 1 huruf (d) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dokumen KEM dan PPKF yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 20 Mei 2023 menjadi bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Memperhatikan hal tersebut DPD RI perlu untuk mencermati dan memberikan analisis serta catatan kritis atas rencana kerja dan arah kebijakan ekonomi makro yang akan dilakukan Pemerintah pada tahun 2024 yang akan datang.

Dokumen KEM PPKF Tahun 2024 yang dikeluarkan pemerintah merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2024. Ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas menyebabkan perekonomian nasional terdampak secara signifikan. Namun demikian, pemulihan ekonomi nasional terlihat sudah menunjukkan hasil yang positif didorong oleh penguatan investasi dan ekspor serta pemulihan konsumsi masyarakat. Peningkatan kinerja perekonomian perlu diperkuat dengan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas Nasional. Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal tahun 2024 yaitu ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***, kebijakan belanja negara dalam RAPBN tahun anggaran 2024. RKP Tahun 2024 diposisikan untuk: (1) mencapai target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024; (2) menyukseskan rangkaian Pemilu tahun 2024; dan (3) menciptakan pembangunan yang lebih baik pada tahun akhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020–2024 sebagai fondasi yang kokoh dalam melanjutkan estafet pembangunan pada periode 2025–2029.

KEM PPKF Tahun 2024 adalah ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** (Sesuai Dokumen KEM-PPKF 2024 dari Kementerian Keuangan). Kondisi faktual diatas akan dianalisis dalam beberapa subbab untuk memudahkan pengkategorian materi analisis, yaitu analisis arah RPJMN 2020-2024, analisis asumsi ekonomi makro dan proyeksi MAPAN Puskadaran, proyeksi ekonomi daerah, analisis penerimaan dan belanja negara dan analisis aspirasi dan masyarakat (Asmasda) DPD RI.

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

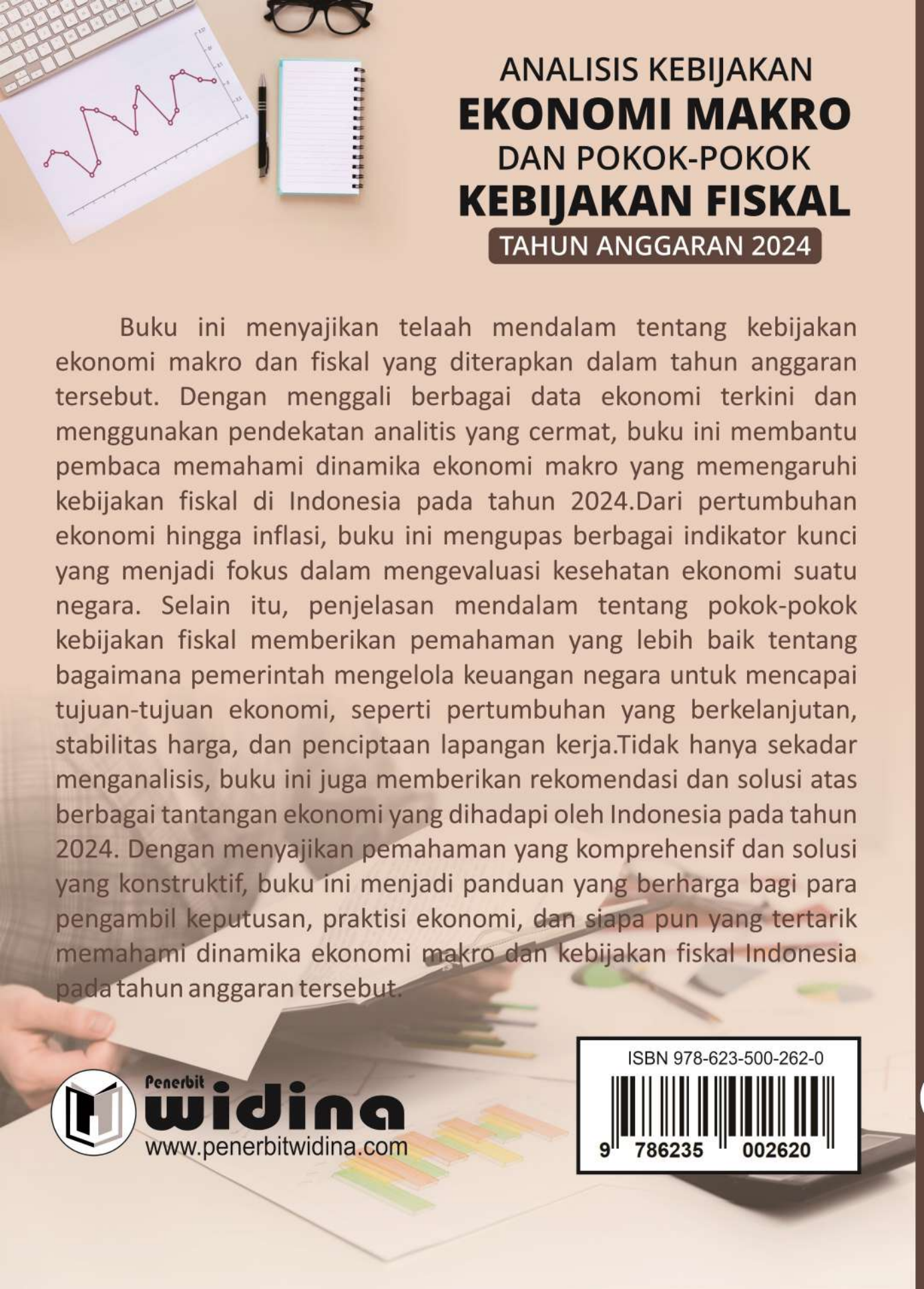
Berdasarkan pada uraian pembahasan terhadap dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 diatas, dapat kami simpulkan beberapa poin penting, yaitu:

1. Dalam KEM & PPKF tahun 2024 Pemerintah akan menempuh dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah. Strategi jangka pendek diarahkan untuk penguatan fungsi stabilisasi dan distribusi melalui pengendalian inflasi, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan daya tarik investasi. Sementara itu strategi jangka menengah difokuskan untuk mendorong reformasi struktural melalui mewujudkan SDM Unggul, akselerasi infrastruktur, penguatan institusional serta mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA.
2. Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi, Pemerintah akan terus memperkuat reformasi fiskal secara holistik melalui optimalisasi pendapatan negara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) secara konsisten, dan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.
3. Pendapatan negara diharapkan dapat mencapai 11,81%-12,38% Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk optimalisasi, tetapi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan. Kebijakan tersebut ditempuh dengan cara menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
4. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.
5. Target proyeksi penerimaan pajak Pemerintah dalam radar konservatif dan dinilai kurang optimal memanfaatkan potensi perpajakan terlebih telah disahkannya regulasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang membuka ruang lebih untuk pemungutan pajak.
6. Stagnansi proyeksi penerimaan PNBP di tengah euforia transformasi tata kelola BUMN yang sejatinya dapat lebih tinggi target PNBP dalam APBN tahun 2024.
7. Kenaikan target penerimaan hibah tahun depan perlu diperhatikan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaannya agar sesuai dengan peruntukannya. Dana hibah tahun depan yang banyak berasal dari dalam negeri utamanya untuk dana pelaksanaan Pemilu sangat sensitif terhadap isu politik yang perlu untuk disikapi serius oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2023. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2023. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2022. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2023. Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Jakarta: BPS
- Bank Indonesia. 2023. Publikasi Laporan Ekonomi Global 2022. Jakarta: BI.
- Creel M. (2006). *Econometrics*. Department of Economics and Economic History, Universitas Autònoma De Barcelona.
- Hansen BE. (2004). *Econometrics*. University of Wisconsin.
- International Labour Organization. 2022. *World Employment and Social Outlook Trends 2021*. Jenewa: ILO.
- Intrilligator MD, RG Bodkin, C Hsiao. (1996). *Econometric Models, Techniques, and Applications*. Second Edition. Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey.
- Johnston J, J Dinardo. (1997). *Econometric Methods*. Fourth Edition, McGraw-Hill International Edition.
- Kemenangan, Angling (2023). UU HKPD dan Upaya Peningkatan Kualitas Desentralisasi Fiskal. Diakses 10 Juli 2023. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/uu-hkpd-dan-upaya-peningkatan-kualitas-desentralisasi-fiskal-fdb78d66/detail/>
- Kementerian Keuangan. 2023. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024*. Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kemenkeu RI. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan RI. 2023. *Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Domestik dan Internaional*. Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. 2023. *Satu Data Perdagangan Domestik dan Global Indonesia Tahun 2022*. www.satudata.kemendag.go.id
- Kementerian PPN/Bappenas. 2021. *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia (Triwulanan) III Tahun 2021*. www.bappenas.go.id
- Knowledge Sector Initiative. 2018. *Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia*. Working Paper 27. Kementerian PPN/ Bappenas & Australia Government.
- Perkumpulan Tax Centre dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia. UU HKPD Disahkan, Penerimaan Pajak Daerah Diestimasi Naik 50%. Diakses 6 Juli 2023. <https://pertapsi.or.id/uu-hkpd-disahkan-penerimaan-pajak-daerah-diestimasi-naik-50>

- Pindyck RS, DL Rubinfeld. 1991. *Econometric Models and Economic Forecasts*. Third Edition. McGraw-Hill Inc, New York.
- Rey S.J. 2000. Integrated Regional Econometric+Input Output Modelling: Issues and Opportunities. *Regional Sciences* 79: 271-292.
- The Economist Group. 2020. Rankings and Trends: Explore the Year-on-Year Trends for the Global Food Security Index (Figures are from Annual Baseline Model). 1 April 2021. <https://foodsecurityindex.eiu.com/Index>
- Utomo, Wahyu (2023). Akselerasi Transformasi Arah Ekonomi Tahun 2024. Diakses 3 Juli 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230524/9/1658704/opini-kem-ppkf-2024-akselerasi-transformasi-arrah-ekonomi>
- Verbeek M. (2000). *A Guide Modern Econometrics*. Jhon Wiley & Son. Ltd. New York.
- Wildan, Muhamad (2023). Sistem Administrasi Pajak Baru Launching 2024. Diakses 3 Juli 2023. <https://news.ddtc.co.id/sistem-administrasi-pajak-yang-baru-djp-grand-launching-mei-2024-1795694>



ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL

TAHUN ANGGARAN 2024

Buku ini menyajikan telaah mendalam tentang kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang diterapkan dalam tahun anggaran tersebut. Dengan menggali berbagai data ekonomi terkini dan menggunakan pendekatan analitis yang cermat, buku ini membantu pembaca memahami dinamika ekonomi makro yang memengaruhi kebijakan fiskal di Indonesia pada tahun 2024. Dari pertumbuhan ekonomi hingga inflasi, buku ini mengupas berbagai indikator kunci yang menjadi fokus dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara. Selain itu, penjelasan mendalam tentang pokok-pokok kebijakan fiskal memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, seperti pertumbuhan yang berkelanjutan, stabilitas harga, dan penciptaan lapangan kerja. Tidak hanya sekadar menganalisis, buku ini juga memberikan rekomendasi dan solusi atas berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia pada tahun 2024. Dengan menyajikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang konstruktif, buku ini menjadi panduan yang berharga bagi para pengambil keputusan, praktisi ekonomi, dan siapa pun yang tertarik memahami dinamika ekonomi makro dan kebijakan fiskal Indonesia pada tahun anggaran tersebut.



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-262-0



9

786235

002620